



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Indonesia

***Correspondence:**

m.nurabdullah@umj.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v7i1.30234](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.30234)

Sitasi:

Birton, M.N.A, Tanjung, J., Maryati,
& Emalia, R. (2024). Fungsi *Idarah*
dan Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Masjid. Jurnal Akademi
Akuntansi, 7(1), 141-155.

Proses Artikel

Diajukan:

20 Oktober 2023

Direviu:

2 November 2023

Direvisi:

26 Februari 2024

Diterima:

27 Februari 2024

Diterbitkan:

28 Februari 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

FUNGSI *IDARAH* DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN MASJID

M. Nur A. Birton*¹, Juita Tanjung², Maryati², Rendi
Emalia⁴

ABSTRACT:

Purpose: This study seeks to achieve three main objectives: (1) discern the actuality of mosque financial reporting; (2) assess stakeholder expectations concerning mosque activities; and (3) evaluate the variance in expectations among stakeholders regarding the reality of mosque financial reporting accountability.

Methodology/Approach: The research employs a survey-based approach, utilizing a questionnaire for data collection. The population encompasses congregants, administrators, and supervisors located in the Pasar Rebo District of East Jakarta, including individuals associated with the Indonesian Mosque Council. Questionnaires were disseminated through both online channels using a Google form and through face-to-face interactions. Data were meticulously processed using SPSS 19, employing descriptive and inferential methods such as Analysis of Variance.

Findings: The study reveals that all mosques possess financial reports primarily intended for dissemination among the congregation, supervisors, administrators, and particularly, administrators themselves. Stakeholders exhibit a preference for the *imarah* function of mosques, coupled with a desire for more comprehensive mosque functions. Stakeholders anticipate activity reports, specifically in the form of an annually issued, printed document, submitted during management meetings. The ANOVA test indicates no significant disparities between expectations and the accessibility of financial reports.

Practical and Theoretical Contributions/Originality: This research augments existing literature by contributing insights from accountability surveys on mosque financial reporting, concentrating on the viewpoint of stakeholders within a specific geographical region. It extends beyond prior case-specific studies of mosques, enriching our comprehension of mosque financial reporting and accountability from a more comprehensive stakeholder standpoint.

Research Limitation: This study is limited within the constrained sample size and an uneven distribution of willing participants among mosques and respondents. The absence of assistance in completing the questionnaire via Google Form introduces the potential for misperceptions and interpretations of instrument items.



Keywords: *Financial Reporting Accountability, Idarah Function, Mosque, Stakeholders.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Studi ini bertujuan (1) mengidentifikasi realitas pelaporan keuangan masjid; (2) menguji ekspektasi *stakeholders* terhadap aktivitas masjid; dan (3) menguji ekspektasi antar*stakeholders* terhadap realitas akuntabilitas pelaporan keuangan masjid.

Metode/pendekatan: Penelitian ini mengaplikasikan metode survei. Pengumpulan data menggunakan angket. Populasi penelitian meliputi jamaah, pengurus, pengawas, pembina, serta pengurus Dewan Masjid Indonesia) di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Angket dibagikan secara *online* menggunakan *google form* dan bertatap muka. Data diolah menggunakan SPSS 19; dan dianalisis secara deskriptif dan inferensia menggunakan *Analysis of Variance*.

Hasil: Hasil penelitian menemukan, seluruh masjid memiliki laporan keuangan dengan sasaran utama penyampaian kepada jamaah, pengawas, pembina, terutama pengurus. *Stakeholders* lebih mengharapkan fungsi *imarah* untuk masjid sekalipun juga menginginkan fungsi masjid yang lebih komprehensif. Laporan aktivitas merupakan jenis laporan keuangan yang paling diharapkan, berupa laporan tahunan, tercetak, dan disampaikan dalam rapat pengurus. Berdasarkan uji ANOVA, tidak terdapat perbedaan signifikan antara harapan dan ketersediaan laporan keuangan.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian ini menambah referensi mengenai hasil survei akuntabilitas pelaporan keuangan masjid dalam perspektif *stakeholders* pada suatu wilayah. Sejumlah penelitian awal lebih banyak bersifat kasus per masjid.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan penelitian ini antara lain, sampel terbatas; masjid dan responden yang bersedia berpartisipasi tidak merata. Tidak adanya pendampingan dalam pengisian kuesioner, terutama melalui *google form*, memungkinkan timbulnya salah persepsi dan interpretasi atas butir-butir instrumen.

Kata kunci: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Fungsi *Idarah*, Masjid, Pemangku Kepentingan.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat sentral dan sangat mempengaruhi kehidupan kaum muslim di manapun mereka berada, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020, dengan penduduk berjumlah 276,4 juta atau 87,2% total penduduk ([World Population Review](#)), terdapat sekitar 275.339 masjid besar, menengah, maupun kecil ([Kementerian Agama, 2020](#)). Artinya, setiap

1000 penduduk terdapat satu masjid; ini belum termasuk tempat ibadah yang lebih kecil/ sederhana, seperti langgar, mushala, *meunasah*, dan sejenisnya.

143

Sekalipun banyak jumlahnya, namun perspektif atas fungsi masjid masih terbatas. [Syafe'i \(2016\)](#), misalnya, membagi fungsi masjid menjadi fungsi keagamaan dan sosial saja. Fungsi keagamaan merupakan tempat peribadatan seperti salat, dzikir, doa dan melakukan i'tikaf. Fungsi sosial masjid, merupakan pusat pembinaan, pendidikan, dan pengajaran bagi umat Islam. Di sisi lain, Kementerian Agama telah melangkah maju dengan membagi fungsi masjid menjadi tiga. Pertama, *imarah* yaitu kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Kedua, *ri'ayah* merupakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid. Ketiga, *idarab* merupakan fungsi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, serta pelaporan ([SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014, Bab I butir 5](#)).

Melalui SK tersebut, Kementerian Agama juga mengeluarkan ketentuan teknis mengenai bidang akuntabilitas keuangan masjid; mencakup akuntabilitas pengadaan uang, pembelanjaan, dan administrasi keuangan. Prinsip-prinsip umum yang perlu ada dalam pengelolaan keuangan masjid adalah, adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM); APBM disusun berdasarkan program masjid; selanjutnya, APBM dapat dimulai pada Muharram s/d Dzulhijjah, Januari s/d Desember, ataupun April s/d Maret.

Aturan tersebut sejalan dengan perspektif [Gray, Adams & Owen \(2014, h. 50\)](#), yaitu "*The duty to provide an account or reckoning of those actions for which one is held responsible*", mengenai akuntabilitas yang diakui [Deegan \(2023\)](#) sebagai definisi akuntabilitas yang baik. Secara ringkas, akuntabilitas adalah kewajiban menyediakan laporan atau pembuatan perhitungan atas pihak yang bertanggung jawab. Ini sama dengan pernyataan [Ebrahim \(2016\)](#), bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tindakan suatu pihak atas pihak lain.

Selanjutnya, [Ebrahim \(2016\)](#) membagi akuntabilitas menjadi empat komponen inti yaitu: (1) transparansi, (2) dapat dipertanggungjawabkan; (3) pemantauan dan evaluasi prosedur; serta (4) penegakan atau sanksi untuk kekurangan dalam kepatuhan, pembenaran, atau transparansi. Berbagai laporan yang disyaratkan literatur akuntabilitas tidak langsung merujuk pada laporan keuangan. Hanya saja, peran laporan keuangan sangat penting dalam mendukung tercapainya akuntabilitas. Sebab, menurut [Lewis \(2006\)](#) "*... one of the primary objectives of an accounting system is to aid accountability*". Khusus bagi organisasi nirlaba, karakteristik akuntabilitas terbagi pada tiga sasaran, yaitu: (1) ke atas, penyandang dana; (2) ke bawah, pihak yang menerima layanan; serta (3) horizontal, berupa pertanggungjawaban atas misi dan staf organisasi ([Ebrahim, 2016](#)).

Sekalipun akuntabilitas sudah memiliki perspektif teoritis yang kuat, termasuk akuntabilitas masjid, namun belum sepenuhnya menjadi perhatian dan komitmen *stakeholders*. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah studi baik studi literatur maupun empirik. Studi literatur yang terbilang komprehensif terkait dengan lingkup *idarab* dapat dilihat pada studi [Maulia dan Baehaqi \(2021\)](#). Menggunakan data 2010–2019 terhadap 102 artikel jurnal nasional dan internasional (21 jurnal terindeks SINTA dan delapan jurnal terindeks scopus). Dilihat sumber artikel, 29 artikel (28,43%) berasal dari Indonesia; mayoritas berasal dari Malaysia, yaitu 66 judul (64,71%). Dari bidang kajian, 49 judul mengkaji aspek manajerial; dan 21 judul menyangkut kajian akuntabilitas. Apabila diakumulasikan, aspek *idarab* mencakup 68,63% judul. Sayangnya, artikel yang diklaim penulis dijadikan sebagai dokumen *review* sebagian besar tidak tercantum dalam daftar pustaka.

JAA

7.1

Di Indonesia, studi-studi mengenai akuntabilitas keuangan masjid umumnya bersifat kasus per kasus. Menurut [Rini \(2018\)](#), sedikit masjid yang membuat laporan keuangan periodik dalam bentuk laporan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. [Lestari et al. \(2019\)](#) juga menemukan bahwa jarang pengelola masjid melakukan pengadministrasian, pembuatan, sampai mempublikasikan laporan keuangan sesuai standar ([Lestari et al., 2019](#)). Jikapun ada, sebagian besar pencatatan keuangan sangat sederhana berupa laporan kas. Lalu, sebagai perwujudan akuntabilitas, pengurus masjid biasanya memilih melaporkan penggunaan dana setiap Jumat menjelang salat Jumat ([Asmasari & Kusumaningtias, 2019](#); [Amarudin & Sofiandri, 2018](#); [Puspitasari, 2016](#); [Rini, 2018](#); [Yuliarti, 2019](#)). Menurut pengurus, pembuatan laporan keuangan itu sulit terutama karena tidak memiliki pemahaman yang baik dalam penyajian laporan keuangan ([Amarudin & Sofiandri, 2018](#); [Asmasari & Kusumaningtias, 2019](#); [Puspitasari, 2016](#); [Rini, 2018](#); [Yuliarti, 2019](#)).

Demikian juga di Malaysia. Menurut [Mohamed et al., \(2014\)](#) cara melihat kelemahan akuntabilitas masjid dapat diamati melalui aspek internal control dan pengawasan. [Masrek, et. al. \(2014\)](#) yang melakukan studi mengenai praktik internal control penerimaan dan pengeluaran dana di 13 masjid distrik negara bagian Selangor dan Persekutuan Kuala Lumpur. Mereka menemukan bahwa praktik tersebut masih butuh banyak perhatian. Studi [Adil, et. al. \(2013\)](#) terhadap 250 masjid Malaysia, baik tingkat distrik (Ind. setara kabupaten/kota), mukim (Ind./Aceh: setingkat di bawah kecamatan), dan qariah (Ind.: tidak ada padanan, lebih rendah dari mukim) memperlihatkan bahwa kebutuhan akuntabilitas berbagai masjid berbeda-beda. Pengurus di tingkat mukim menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Hal ini berarti, baik di Malaysia maupun Indonesia, praktik akuntabilitas masih memiliki banyak tantangan sehingga perlu dilakukan studi lebih lanjut. Khususnya di Indonesia, studi atas akuntabilitas masjid perlu dikaji dalam area tertentu, bukan kasus per kasus. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi realitas akuntabilitas pelaporan keuangan masjid; (2) menguji ekspektasi *stakeholders* terhadap aktivitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan masjid; dan (3) menguji ekspektasi antar *stakeholders* terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan masjid di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kecamatan Pasar Rebo merupakan satu dari sepuluh kecamatan di Jakarta Timur dengan penduduk berjumlah 222.670 jiwa. Sembilan kecamatan lainnya adalah Ciracas berpenduduk 299.399 jiwa, Cipayang 290.306 jiwa, Makasar 208.365 jiwa, Kramat Jati 299.499, Jatinegara 303.687 jiwa, Duren Sawit 415.356 jiwa, Cakung 561.640, Pulogadung 281.698 jiwa, dan Matraman 173.730 jiwa. Dilihat dari struktur pemerintahan, Kecamatan Pasar Rebo terdiri dari 5 Kelurahan, 53 RW dan 525 RT (Tabel 1). Pada tahun 2021, jumlah masjid di Jakarta Timur merupakan mencapai 1.098 dari 3.433 buah masjid atau 30,06% masjid di DKI Jakarta.

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Masjid	Mushola
Pasar Rebo	5	53	525	89	161
Ciracas	5	49	609	124	206
Cipayung	8	56	508	105	216
Makasar	5	53	567	80	137
Kramat Jati	7	65	645	90	179
Jatinegara	8	91	1,112	94	179
Duren Sawit	7	96	1,105	157	199
Cakung	7	90	1,038	160	361
Pulo Gadung	7	95	1,035	122	174
Matraman	6	62	796	77	89
Jumlah	65	710	7,940	1,098	1,901

Tabel 1.
Struktur Pemerintahan dan Sebaran Masjid Se-Jakarta Timur Tahun 2021

Sumber:

<https://jaktimkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/41c7914facd84ea32a066c44/kota-jakarta-timur-dalam-angka-2022.html>

Sekalipun tidak memiliki jumlah masjid dan mushala terbanyak, Pasar Rebo dipilih sebagai populasi penelitian karena di Kecamatan ini memiliki Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang aktif dan bersedia membantu menghubungkan peneliti dengan pengurus/jamaah masjid di wilayah kerjanya. Struktur DMI di Kecamatan Pasar Rebo telah sampai ke tingkat ranting (tingkat kelurahan) dan sangat aktif melayani Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), terutama pendampingan untuk memperoleh Biaya Operasional Tempat Ibadah (BOTI), insentif imam, insentif marbot dan insentif guru mengaji.

Penelitian ini mengaplikasikan metode survei. Data primer dikumpulkan menggunakan angket. Responden yang dituju adalah pemangku kepentingan (Jamaah, Jamaah-Pengurus/pengawas/pembina, serta Jamaah-Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Instrumen survei (angket) disusun berdasarkan tiga kelompok penting, yaitu: (1) realita pelaporan keuangan masjid; (2) harapan pemangku kepentingan terhadap masjid dan pelaporan keuangannya; (3) harapan pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan dan akuntabilitas masjid. Validitas instrumen penelitian mengaplikasikan validitas konstruk, yaitu berdasarkan defenisi para ahli ([Ancok, 1989: 125](#)). Pemaknaan konsep akuntabilitas merujuk pada [Gray, Adams & Owen \(2014\)](#) dalam [Deegan \(2023\)](#); termasuk makna konsep fungsi idarah masjid. Angket diuji terlebih dahulu dalam kelompok kecil (*pilot test*) kepada pengurus dan jamaah masjid untuk mendapatkan masukan. Dua pekan setelah *pilot test* dan perbaikan instrumen dilakukan pengumpulan data ulang dengan tetap memasukkan kelompok yang telah mengikuti *pilot test*.

Pendapat responden diukur menggunakan skala (2=setuju; 1=tidak setuju) untuk bidang (1) agar persetujuan responden lebih kuat. Skala Likert (4=sangat setuju; 3=setuju; 2=tidak setuju; 1=sangat tidak setuju) dipakai untuk mengukur pendapat/pengalaman responden untuk bidang (2) dan (3) dengan persetujuan yang lebih longgar. Kuesioner dibagikan melalui online (*google form*) dikirim melalui WhatsApss Grup. Kuesioner *offline* diberikan secara manual kepada responden secara tatap muka. Berdasarkan uji validitas, terdapat nilai signifikan untuk setiap pertanyaan yang tertera pada variabel Kondisi Pelaporan Keuangan Masjid, Fungsi Masjid Sepatutnya, Fungsi Imarah, Fungsi Idarah, Jenis Laporan Keuangan Tahunan, Sasaran Penyampaian Laporan Keuangan, Penyampaian Laporan Keuangan dan

Media penyampaian Laporan Keuangan. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dari semua variabel adalah valid. Seluruh variabel yang di analisis dinyatakan valid karena masing-masing butir pernyataan memiliki skor lebih dari 0,30. Selanjutnya, hasil uji reabilitas menggunakan cronbach's alpha menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach's alpha $> 0,5$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel (*lihat lampiran 1*).

Data diolah menggunakan bantuan excel dan SPSS 19. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensia yaitu *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antarkelompok dalam sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Responden yang berpartisipasi dibagi tiga kategori, (1) jenis kelamin; (2) afiliasi responden dengan masjid; dan (3) lama afiliasi responden dengan masjid (**Tabel 2**). Total responden yang berpartisipasi sebanyak 32 orang, pria 26 orang (81,25%) dan wanita 6 orang (18,75%). Afiliasi antara masjid dan responden awalnya dibagi menjadi enam kelompok, yaitu (1) Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Pasar Rebo; (2) Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lainnya) Yayasan Masjid; (3) Pengurus Yayasan Masjid; 4) Pembina Yayasan Masjid; (5) Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM); dan (6) Jamaah Masjid. Nantinya, untuk mudah melakukan analisis (uji Anova), seluruh *stakeholder* dibagi tiga kelompok, yaitu jamaah 16 orang (50%); jamaah/pengurus yayasan/Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) (bagi masjid yang aktivitasnya hanya peribadatan, *imarah*) 12 orang (37,50%); Jamaah/Pembina/Pengawas/Dewan Masjid 4 orang (12,50%).

Lama waktu afiliasi antara reponden dengan masjid dapat digambarkan sebagai berikut. Afiliasi selama 1-4 tahun sebanyak 11 orang (34,38%); 5-8 tahun tujuh orang (21,88); 9-12 tahun empat orang (12,50%), dan > 12 tahun 10 orang (31,25%).

Profil Responden	Uraian	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Pria	26	81.25
	Wanita	6	18.75
Afiliasi dengan Masjid	Jamaah	16	50.00
	Jamaah/Pengurus/DKM	12	37.50
	Jamaah/Pembina/Pengawas/Dewan Masjid	4	12.50
Lama Afiliasi	1 - 4 tahun	11	34.38
	5 - 8 tahun	7	21.88
	9 - 12 tahun	4	12.50
	> 12 tahun	10	31.25

Tabel 2.
Profil Responden

Terhadap 32 responden yang bersedia berpartisipasi, tersebar di lima kelurahan, 13 RW, dan 15 RT/Masjid. Kelurahan Baru tiga responden (9,38%), tersebar di dua RW (15,38%), dan dua RT/Masjid (13,33%). Kelurahan Cijantung 22 responden (68,75%), yang tersebar di lima RW (38,46%), dan tujuh RT/Masjid (46,67%). Kelurahan Gedong satu responden (7,69%), satu RW (6,67%), dan satu RT/Masjid (3,13%). Kelurahan Kalisari empat responden (12,50%), yang tersebar di tiga RW (23,08%), dan tiga RT/Masjid (20,00%). Kelurahan

Pekayon diwakili dua responden (6,25%), yang tersebar di dua RW (15,38%), dan dua RT/Masjid (13,33%) (**Lihat Tabel 3**).

147

Kelurahan	RW		RT/Masjid		Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Baru	2	15.38	2	13.33	3	9.38
Cijantung	5	38.46	7	46.67	22	68.75
Gedong	1	7.69	1	6.67	1	3.13
Kalisari	3	23.08	3	20.00	4	12.50
Pekayon	2	15.38	2	13.33	2	6.25
Total	13	100.00	15	100.00	32	100.00

Tabel 3.
Sebaran Responden Menurut Domisili/Masjid

Profil masjid disederhanakan pada tiga indikator utama: (1) badan hukum; (2) luas tanah/tapak/bangunan; dan shalat dijadikan sebagai aktivitas utama (dengan tiga pilihan waktu, maghrib, subuh dan Juma'at) (**Tabel 4**). Dilihat dari badan hukumnya, 10 masjid (66,67%) merupakan Yayasan Wakaf, tiga Masjid (20%) berbadan hukum Yayasan, dan dua masjid (13, 33%) berbadan hukum lain. Badan hukum lain, menurut keterangan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pasar Rebo M. Yamin, kemungkinan dibangun keluarga, Karena, di Kecamatan Pasar rebo, masih banyak masjid dimiliki dan dikelola keluarga.

Profil Masjid	Uraian	Jumlah	%
Badan Hukum	Yayasan Wakaf	10	66,67
	Yayasan	3	20,00
	Lainnya	2	13,33
Luas Tanah/Tapak	< 400 m ²	10	66,67
	> 400 m ²	5	33,33
Luas Bangunan	< 300 m ²	10	66,67
	> 300 m ²	5	33,33
Aktivitas Shalat	Maghrib		
	< 50 Orang	4	26,67
	> 50 Orang	11	73,33
	Subuh		
	< 30 Orang	5	33,33
	> 30 Orang	10	66,67
	Jumat		
	< 300 Orang	8	53,33
	> 300 Orang	7	46,67

Tabel 4.
Profil Masjid dan Aktivitas Shalat

JAA

7.1

Luas tanah/tapak dan luas bangunan dapat menjadi indikator besar kecilnya masjid jamik. Luas tanah/tapak masjid < 400 m² sebanyak 10 masjid (66,67%), dan > 400 m² sebanyak lima masjid (33.33%). Sementara itu, luas bangunan masjid < 300 m² 10 masjid (66,67%), dan > 400 m² sebanyak lima masjid (33.33%). Secara indikatif, aktivitas masjid diukur dari tiga aktivitas shalat, yaitu maghrib, subuh, dan Jumat. Maghrib merupakan waktu berkumpul

masyarakat dan biasanya salat yang paling ramai. Sebaliknya, waktu subuh merupakan waktu yang menggambarkan waktu paling sulit jamaah untuk ke masjid.

Realita Pelaporan Keuangan Masjid

Berdasarkan Tabel 5, baik terhadap (1) jenis laporan keuangan yang dihasilkan masjid; (2) sasaran penyampaian laporan keuangan; maupun (3) frekuensi penyampaian laporan keuangan, *mean*nya melebihi 1,5 atau mendekati dua (karena 1 berarti tidak ada, 2 berarti ada). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek yang ditanyakan kepada responden sudah tersedia di seluruh masjid sampel. Berdasarkan temuan tersebut dapat diartikan bahwa seluruh masjid sampel memiliki laporan keuangan, terutama laporan arus kas (*mean* = 1,91; SD 0,34); sasaran penyampaian laporan keuangannya adalah kepada pengurus (*mean* = 1,91; SD 0,34); sementara penyampaian laporan keuangan bersifat tahunan (*mean* = 1,84; SD 0,37).

Realita Pelaporan Keuangan Masjid	Mea n	Std. Dev
Jenis Laporan Keuangan Yang dihasilkan masjid		
1 Laporan posisi keuangan (neraca)	1,88	0.34
2 Laporan Arus Kas	1,91	0.30
3 Laporan Perubahan Dana	1,72	0.46
4 Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan	1,72	0.46
Sasaran Penyampaian Laporan Keuangan		
5 Laporan keuangan disampaikan kepada jamaah	1,78	0.42
6 Laporan keuangan disampaikan kepada pengurus	1,91	0.30
7 Laporan keuangan disampaikan kepada pengawas	1,69	0.47
8 Laporan keuangan disampaikan kepada Pembina	1,69	0.47
Frekuensi Penyampaian Laporan Keuangan		
9 Frekuensi penyampaian Laporan Keuangan bulanan	1,59	0.50
10 Frekuensi Penyampaian Laporan Keuangan tahunan	1,84	0.37

Tabel 5.
Deskripsi
Realita
Pelaporan
Keuangan
Masjid

Temuan ini berbeda dengan studi [Rini \(2018\)](#) yang menyatakan hanya beberapa masjid yang telah membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan. Perbedaan lebih kontras dapat ditemukan pada studi [Puspitasari \(2016\)](#), [Amarudin & Sofiandri \(2018\)](#), [Rini \(2018\)](#), [Yuliarti \(2019\)](#), serta [Asmasari & Kusumaningtias \(2019\)](#) yang menemukan bahwa sebagian besar pencatatan akuntansi masjid masih sederhana berupa laporan kas (saja).

Sasaran utama penyampaian laporan keuangan disampaikan kepada jamaah, pengawas, pembina, terutama kepada pengurus. Sementara itu, frekuensi penyampaian laporan keuangan masjid disajikan secara tahunan dibandingkan bulanan. Hal ini secara kontras juga berbeda dengan studi [Puspitasari \(2016\)](#), [Amarudin & Sofiandri \(2018\)](#), [Rini \(2018\)](#), [Yuliarti \(2019\)](#), serta [Asmasari & Kusumaningtias \(2019\)](#) yang menemukan bahwa pengurus masjid lebih memilih melaporkan penggunaan dana setiap hari Jum'at, menjelang salat Jum'at.

Harapan Terhadap Fungsi dan Aktivitas Masjid

149

Tabel 6 menggambarkan harapan *stakeholders* terhadap fungsi dan aktivitas masjid. Mayoritas responden mengharapkan bahwa masjid berfungsi *imarab*, yaitu ibadah berkala saja (butir 15) dengan mean 3,53 dan SD = 0,67. Ini menandakan bahwa *stakeholder* belum menginginkan banyak perubahan pada fungsi masjid. Harapan terhadap masjid yang lebih komprehensif juga diinginkan, dengan mean yang sedikit lebih rendah 3,41 dan SD = 0,67.

Harapan Terhadap Fungsi Dan Aktivitas Masjid		Mean	Std. Dev
Lingkup Aktivitas Masjid			
11	Masjid berfungsi sebagai <i>imarab</i> (kegiatan peribadatan, pendidikan dan sosial)	2.97	0.86
12	Masjid berfungsi sebagai <i>imarab</i> dan <i>ri'ayah</i> (pengadaan dan pemeliharaan fasilitas).	2.97	0.69
13	Masjid berfungsi sebagai <i>imarab</i> dan <i>idarab</i> (administrasi, keuangan dan pelaporan).	3.00	0.72
14	Masjid berfungsi sebagai <i>imarab</i> , <i>ri'ayah</i> dan <i>idarab</i> .	3.41	0.67
15	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup kegiatan ibadah berkala saja	3.53	0.67
16	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup <i>ta'lim</i> rutin dan kegiatan hari-hari besar Islam	3.19	0.54
17	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup Taman Pendidikan Al Quran	3.22	0.55
18	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup penerimaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah	3.25	0.57
19	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup pengelolaan wakaf	3.19	0.54
20	Fungsi <i>imarab</i> , mencakup santuan anak yatim dan dhuafa	3.25	0.51
21	Fungsi <i>idarab</i> (administrasi, keuangan dan laporan), masjid membuat rencana kegiatan tahunan	3.38	0.55
22	Fungsi <i>idarab</i> , masjid membuat rencana anggaran tahunan	3.41	0.56
23	Fungsi <i>idarab</i> masjid, secara berkala melakukan pengawasan atas kegiatan operasional masjid	3.41	0.56
23	Fungsi <i>idarab</i> , masjid membuat laporan kegiatan tahunan	3.38	0.55
25	Fungsi <i>idarab</i> , masjid membuat laporan keuangan tahunan	3.38	0.55

Tabel 6.
Harapan Terhadap Fungsi dan Aktivitas Masjid

Harapan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid

Harapan atas pelaporan dan akuntabilitas *idarab* masjid dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 7, di antara laporan keuangan yang sangat diharapkan adalah Laporan Aktivitas (*mean* 3,28; SD 0,58). Sasaran penyampaian laporan keuangan tampak merata, baik kepada pengawas, jamaah, pembina, dan dengan sasaran pengurus lebih tinggi (*mean* 3,38; SD 0,55). Untuk frekuensi penyampaian laporan keuangan, baik enam bulanan maupun tahunan memiliki nilai yang sama, namun lebih fokus ke laporan tahunan karena memiliki *mean* 2,97; SD 0,73. Untuk media penyampaian laporan keuangan memiliki nilai 3,19 dengan SD 0,48, *stakeholders* menginginkan penyampaian laporan keuangan cukup dalam rapat pengurus dan dalam bentuk tercetak.

Harapan Terhadap Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Masjid		Mean	Std. Dev
Jenis Laporan Keuangan			
26	Jenis laporan keuangan tahunan mencakup Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	3.22	0.61
27	Jenis laporan keuangan tahunan masjid mencakup Laporan Arus Kas	3.22	0.55
28	Jenis laporan keuangan tahunan masjid mencakup Laporan Perubahan Dana	3.19	0.54
29	Jenis laporan keuangan tahunan masjid mencakup Laporan Aktivitas	3.28	0.58
30	Jenis laporan keuangan tahunan masjid mencakup Catatan atas Laporan Keuangan	3.25	0.62
Sasaran Penyampaian Laporan Keuangan			
31	Sasaran penyampaian laporan keuangan mencakup jamaah	3.31	0.59
32	Sasaran penyampaian laporan keuangan mencakup pengurus	3.38	0.55
33	Sasaran penyampaian laporan keuangan mencakup pengawas	3.28	0.58
34	Sasaran penyampaian laporan keuangan mencakup pembina	3.31	0.54
Frekuensi Penyampaian Laporan Keuangan			
35	Frekuensi penyampaian laporan keuangan masjid setidaknya enam bulan sekali	2.97	0.74
36	Frekuensi penyampaian laporan keuangan masjid setidaknya setahun sekali	2.97	0.73
Media Penyampaian Laporan Keuangan			
37	Media penyampaian laporan keuangan sepatutnya melalui website masjid	3.06	0.62
38	Media penyampaian laporan keuangan sepatutnya melalui majalah dinding	3.16	0.57
39	Media penyampaian laporan keuangan sepatutnya melalui forum rapat pengurus dengan mencetak laporan	3.19	0.48
40	Media penyampaian laporan keuangan sepatutnya diumumkan di hadapan jamaah pada hari Jumat	3.19	0.59

Tabel 7.
Harapan Terhadap Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Masjid

Tabel 8 bermaksud mendeskripsikan mengenai informasi (1) ketersediaan laporan keuangan, dan (2) kebutuhan laporan keuangan alternatif menurut tiga kelompok *stakeholders*. Ketiga kelompok *stakeholders* tersebut adalah (1) jamaah/pengawas/pembina/pengurus Dewan Masjid Indonesia; (2) jamaah/pengurus/DKM; dan (3) Jamaah. Terhadap ketersediaan laporan keuangan, memiliki *mean* 1,77 dari nilai max 2, dan SD 0,42. Ini bermakna bahwa seluruh *stakeholders* berpendapat bahwa laporan keuangan di masjid lingkungannya sudah tersedia. Untuk kebutuhan laporan keuangan alternatif memiliki nilai 3,19 dari nilai max 4 dengan SD 0,62. Hal ini memberi interpretasi bahwa *stakeholders* menghendaki laporan keuangan alternatif dibandingkan laporan keuangan yang sudah ada di masjid lingkungan mereka.

		N	Mean	Std. Dev	Std. Error	Min	Max
Ketersediaan Laporan Keuangan	Jamaah/Pembina/Pengawas /DMI	4	1.85	0.4	0.057	1	2
	Jamaah/Pengurus/DKM	12	1.72	0.4	0,040	1	2
	Jamaah Total	16	1.78	0.4	0.032	1	2
Kebutuhan Laporan Keuangan Alternatif	Jamaah/Pembina/Pengawas /DMI	4	3.47	0,59	0.054	2	4
	Jamaah/Pengurus/DKM	12	3.24	0.6	0.033	1	4
	Jamaah Total	16	3.09	0.6	0.027	2	4
		32	3.19	0,62	0.020	1	4

Tabel 8.
Ketersediaan Laporan Keuangan dan Kebutuhan Laporan Keuangan Alternatif

Berdasarkan hasil uji ANOVA diketahui bahwa ketersediaan Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,532 lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa sekalipun tersedia berbagai laporan keuangan namun tidak terdapat perbedaan signifikan antara Ketersediaan Laporan Keuangan (Jenis Laporan keuangan, Cara Penyampaian laporan Keuangan) di antara *stakeholders*. Demikian juga terhadap Kebutuhan Atas Laporan Keuangan Alternatif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,189 lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa sekalipun membutuhkan laporan keuangan alternatif namun tidak terdapat perbedaan signifikan kebutuhan Laporan Keuangan alternatif di antara para *stakeholder* tersebut (Lihat Tabel 9).

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketersediaan Laporan Keuangan	Between Groups	5,469	2	2,734	0.645	0.532
	Whithin Groups	123,000	29	4,241		
	Total	128,469	31			
Kebutuhan Laporan Keuangan Alternatif	Between Groups	440,208	2	220,104	1.763	0.189
	Whithin Groups	3620.667	29	124,851		
	Total	4060.875	31			

Tabel 9.
Uji ANOVA Terhadap Kebutuhan dan Ketersediaan Laporan Keuangan

Penelitian ini memperkuat perspektif umum *stakeholders* masjid bahwa fungsi utama masjid adalah pelayanan pada aktivitas ibadah (*imarab*) dalam makna yang sempit (utamanya ibadah berkala). Terkait dengan aspek *imarab* (dilihat secara global) preferensi *stakeholders* lebih rendah dibandingkan ketika ditanyakan. Artinya preferensi stakeholders meningkat apabila aspek yang ditanyakan bersifat rinci. Selanjutnya, preferensi lebih tinggi terjadi ketika aspek *imarab* dan *idarab* digabung dibandingkan dengan ketika *imarab* dan *ri'ayah* disandingkan (Tabel 6). Studi ini memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran preferensi. Biasanya, biasanya secara klasik urutan preferensi adalah dimulai dari *imarab - ri'ayah - idarab* dan kini menjadi *imarab - idarab - ri'ayah*. Namun ketika tidak ada perbedaan preferensi di antara para *stakeholders* terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan masjid ini masih menyimpan masalah. Semestinya, preferensi pengawas dan pengurus harus berbeda, dengan jamaah masjid.

Temuan penelitian ini hampir sama dengan studi [Asdar et. al \(2014\)](#) yang melihat bahwa jamaah tidak begitu peduli dengan rendahnya akuntabilitas masjid, terutama dalam bentuk pelaporan keuangan. Menggunakan pemaknaan akuntabilitas oleh [Gray, Adams & Owen \(2014\)](#) dalam [Deegan \(2023\)](#), tampaknya posisi pengurus yang menjadi pihak yang bertanggung jawab membuat laporan dan melaporkan kepada *stakeholders* masjid merupakan hal yang logis. Sementara, studi [Adil, et. al. \(2013\)](#) di Malaysia yang menemukan telah ada praktik akuntabilitas. Namun, ada perbedaan signifikan antarkelompok terhadap praktik akuntabilitas di Malaysia. Pengurus masjid di tingkat mukim setuju terhadap praktik akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan di tingkat distrik, dan kariah termasuk masjid pribadi.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, *stakeholders* masjid di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur secara umum berpendapat bahwa pelaporan keuangan di lingkungan mereka sudah memadai. Laporan Arus Kas merupakan menjadi laporan yang dominan, biasanya hanya dipakai oleh pengurus, dan laporan disampaikan secara tahunan. Kedua, aktivitas (fungsi) masjid terkait *imarab* berupa ibadah berkala lebih besar diharapkan dibandingkan tiga aktivitas yaitu *imarab*, *ri'ayah*, dan *idarab* jika dilakukan sekaligus; sama nilainya terhadap aktivitas idarah secara tersendiri, yaitu pembuatan rencana tahunan dan pengawasan kegiatan masjid. Ketiga, terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan masjid, di antara berbagai jenis laporan, laporan aktivitas yang paling diharapkan, berupa laporan tahunan, tercetak, dan cukup disampaikan dalam rapat pengurus. Berdasarkan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan atas harapan Ketersediaan Laporan Keuangan (Jenis Laporan keuangan, Cara Penyampaian laporan Keuangan) di antara *stakeholders* (Jamaah, Pengurus dan Dewan Pembina/Pengawas dan DMI).

Karena penelitian ini belum konklusif, maka perlu, *pertama*, menguji kembali instrumen pengukurannya. Kedua, perlu memperluas sampel ke wilayah DKI Jakarta, setidaknya di Jakarta Timur. Hal ini penting untuk memetakan kembali secara tepat fakta bahwa ketersediaan Laporan Keuangan oleh masjid merupakan sebuah fakta bukan yang dipersepsikan responden. Demikian juga kebutuhan *stakeholder* masjid, yaitu jamaah, pengurus/DKM, pengawas/pembina/Dewan Masjid Indonesia terhadap laporan keuangan alternatif. Ketiga, perlu penelitian kualitatif, berupa wawancara dan observasi mengenai kebenaran adanya laporan keuangan di masing-masing masjid.

Keterbatasan penelitian ini antara lain, *pertama*, sampel sebanyak 15 masjid dengan 32 responden masih terbilang terbatas. Jumlah tersebut baru mencapai 16, 85% dari 89 masjid di Pasar Rebo. Kedua, masjid dan responden yang bersedia berpartisipasi tidak merata. Kelurahan Cijantung mendominasi, baik dilihat dari jumlah responden, jumlah masjid/RT, dan jumlah RW-nya. *Ketiga*, tidak adanya pendampingan dalam pengisian kuesioner, terutama melalui *google form*, memungkinkan timbulnya salah persepsi dan interpretasi atas butir-butir instrumen; termasuk tidak adanya wawancara mendalam dan observasi untuk membuktikan apa yang dipersepsikan responden.

Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan. Para pihak, terutama Pemerintah DKI Jakarta, yang selama ini memberikan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) melalui Dewan Masjid Indonesia untuk meminta laporan, bukan hanya Laporan Pertanggungjawaban BOTI, juga meminta menyiapkan laporan keuangan juga. Kedua, SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 dapat menjadi pintu masuk bagi Kementerian

Agama agar perhatian *stakeholders* pada akuntabilitas laporan keuangan masjid lebih meningkat.

153

PENGHARGAAN

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan hibah penelitian pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 417 Tahun 2022 tentang Penetapan Dosen Penerima Pendanaan Hibah Penelitian Internal Tahun Pelaksanaan 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. A. M., Mohd-Sanusi, Z., Jaafar, N. A., Khalid, M. M., & Aziz, A. A. (2013). Financial management practices of mosques in Malaysia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 3(1), 23–29. <https://doi.org/10.7187/GJAT302013.03.01>
- Amarudin, A., & Sofiandri, A. (2018). Perancangan dan Implementasi Aplikasi Ikhtisar Kas Masjid Istiqomah Berbasis Desktop. *Jurnal Tekno Kompak*, 12(2), 51. <https://doi.org/10.33365/jtk.v12i2.148>
- Ancok, D. (1989). “Validitas dan Reliabilitas Istrumen Penelitian” dalam Singarimbun, M. & Effendi (Eds.). *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Asdar, A., Ludigdo, U., & Widya P, Y. (2014). Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(4), 10–17. <https://doi.org/10.9790/5933-0541017>
- Asmasari, W. D., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Masjid Jami' Baitul Muslimin. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 1–8.
- Deegan, C. (2023). *Financial Accounting Theory*, 5th Edition. Cengage Learning Australia Pty Limited.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2014). Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014. Diakses melalui <https://simas.kemenag.go.id/page/download/detail/5eBBBB340678f> pada tanggal 16 Maret 2021.
- Ebrahim, A. (2016). The Many Faces of Nonprofit Accountability. In *The Handbook of Nonprofit Leadership and Management* (pp. 102–123). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119176558.ch4>
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment*. Pearson Higher Ed.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hentika, N. P. (2016). Menuju Restorasi Fungsi Masjid: Analisis Terhadap Handicap Internal Takmir Dalam Pengembangan Manajemen Masjid. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 161–177. <https://doi.org/10.14421/jmd.2016.%x>
- Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., Razak, A. A., Habidin, N. F., Mohamad, S. I. S. (2012). Eksplorasi Dana Kewangan Masjid di Negeri Perak. *Prosiding PERKEM VII*, Jilid 2, 1274 – 1286. http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVII/PKEM2012_4E3.pdf

- Kementerian Agama. (2020). Data Masjid dan Mushala. Diakses melalui <https://simas.kemenag.go.id/> pada tanggal 06 Maret 2021.
- Lestari, R. M. E., Ilmiyono, A. F., Mahali D.A. (2019). Effect of Good Corporate Governance Practices Toward the Mosque Accounting Application Survey of Mosque in Bogor. *Journal of Humanities and Social Studies*, 3(2), 60-66. <https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1457>
- Lewis, M. K. (2006). Accountability and Islam. *The Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition*.
- Masrek, M. N., Mohamed, I.S., Daud, N.M., Arshad, R., & Omar, N. (2014). Internal Financial Controls Practices of District Mosques in Central Region of Malaysia, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(3), 255–258. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.380>
- Maulia, D.A., Baehaqi, A. (2021). Studi Literatur Riset Akuntansi dan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(2), 104-112. <https://doi.org/10.24853/jago.1.2.104-112>
- Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque fund management: issues on accountability and internal controls. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 145, 189 – 194. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>
- Puspitasari, D. (2016). Fenomenology Praktik Akuntabilitas Masjid Al Munawaroh Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*. <https://jurnal.unmuahjember.ac.id/index.php/snecp/article/download/218/147>
- Rini. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 109-126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45-56. <https://doi.org/10.30872/jkin.v15i2.4029>
- Syafe'i, M. (2016). Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam. Diakses melalui [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE'I/MASJID_DALAM_PRESPEKTIF_SEJARAH_DAN_HUKUM_ISLAM_\(10_HALAMAN\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE'I/MASJID_DALAM_PRESPEKTIF_SEJARAH_DAN_HUKUM_ISLAM_(10_HALAMAN).pdf)
- World Population Review. (2020). Indonesia Population 2021. Diakses melalui <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country> pada 6 Maret 2021.
- Yasoa', M. R., Ghazali, M. S., Alwi, M. A. M., Rahman, A. H. A., Abdullah, S. S., Abdullah, A. R., Ismail, M., & Yaacob, M. R. (2019). Fund Management – An Exploratory Case Study of Several Mosques in Kelantan. *Research in World Economy*, 10(2), 53-57. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p53>
- Yuliarti, N. C. 2019. Akuntansi Masjid sebagai Solusi Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 4(1), 13-21. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2106>

Lampiran 1

155 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	R Hitung	Signifikan	Simpulan	Cronbach' Alpha
Kondisi Pelaporan Keuangan Masjid	KPKM1	0,466	0,007	Valid	0,652
	KPKM2	0,383	0,031	Valid	
	KPKM3	0,641	0,000	Valid	
	KPKM4	0,398	0,024	Valid	
	KPKM5	0,378	0,033	Valid	
	KPKM6	0,650	0,000	Valid	
	KPKM7	0,447	0,006	Valid	
	KPKM8	0,646	0,000	Valid	
	KPKM9	0,456	0,009	Valid	
	KPKM10	0,498	0,004	Valid	
Fungsi Masjid Sepatutnya	FMS1	0,800	0,000	Valid	0,830
	FMS2	0,933	0,000	Valid	
	FMS3	0,915	0,000	Valid	
	FMS4	0,616	0,000	Valid	
Fungsi Imarah	FIM1	0,360	0,043	Valid	0,858
	FIM2	0,868	0,000	Valid	
	FIM3	0,849	0,000	Valid	
	FIM4	0,922	0,000	Valid	
	FIM5	0,798	0,000	Valid	
	FIM6	0,908	0,000	Valid	
Fungsi Idarah	FID1	0,962	0,000	Valid	0,975
	FID2	0,952	0,000	Valid	
	FID3	0,930	0,000	Valid	
	FID4	0,962	0,000	Valid	
	FID5	0,962	0,000	Valid	
Jenis Laporan Keuangan Tahunan	JLKT1	0,849	0,000	Valid	0,942
	JLKT2	0,957	0,000	Valid	
	JLKT3	0,946	0,000	Valid	
	JLKT4	0,904	0,000	Valid	
	JLKT5	0,867	0,000	Valid	
Sasaran Penyampaian Laporan Keuangan	SPLK1	0,736	0,000	Valid	0,879
	SPLK2	0,951	0,000	Valid	
	SPLK3	0,844	0,000	Valid	
	SPLK4	0,908	0,000	Valid	
Penyampaian Laporan Keuangan	PLK1	0,940	0,000	Valid	0,853
	PLK2	0,929	0,000	Valid	
Media penyampaian Laporan Keuangan	MPLK1	0,670	0,000	Valid	0,790
	MPLK2	0,792	0,000	Valid	
	MPLK3	0,866	0,000	Valid	
	MPLK4	0,842	0,000	Valid	